



Otoritas Pajak Pertegas Aturan Pemanfaatan Tax Treaty

Direktorat Jenderal Pajak mempertegas ketentuan pemanfaatan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau *tax treaty* dengan menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER-10/PJ/2017 pada 19 Juni 2017.

Beleid tersebut menggantikan Perdirjen Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan P3B, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010. Selain itu, peraturan ini juga memasukan substansi Perdirjen Pajak Nomor 62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan P3B yang telah diubah dengan Perdirjen Pajak Nomor PER-25/PJ/2010.

Dengan terbitnya Perdirjen Pajak Nomor PER–10/PJ/2017, secara otomatis Perdirjen Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 yang telah diubah dengan PER-24/PJ/2010 dan PER-62/PJ/2009 yang telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi per 1 Agustus 2017.

Beneficial Owner

Dalam peraturan P3B yang baru terdapat penambahan jenis subjek pajak luar negeri, yakni dana pensiun. Selain itu, Perdirjen Pajak Nomor PER–10/PJ/2017 juga mempertegas ketentuan mengenai penerima manfaat yang sesungguhnya atas penghasilan (*beneficial owner*), yang sebelumnya diatur dalam Perdirjen Pajak Nomor PER-25/PJ/2010. Penegasannya adalan WPLN yang memenuhi ketentuan sebagai *beneficial owner* tidak boleh bertindak sebagai agen, *nominee*, atau *conduit*.

Khusus untuk WPLN Badan, ada sejumlah ketentuan *beneficial owner* yang dipersyaratkan dan harus diklarifikasi dalam formulir DGT-1, yakni:

- 1. mempunyai kendali untuk menggunakan atau menikmati dana, aset, atau hak yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia;
- 2. tidak lebih dari 50% penghasilan badan digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain;
- 3. menanggung risiko atas aset, modal atau kewajiban yang dimiliki; dan

4. tidak mempunyai kewajiban baik tertulis maupun tidak tertulis untuk meneruskan sebagian atau seluruh penghasilan yang diterima dari Indonesia kepada pihak lain.

Surat Keterangan Domisili (SKD)

DJP juga menambahkan sejumlah persyaratan bagi WPLN terkait SKD yang memenuhi persyaratan administrasi, antara lain *Certificate of Residence* sebagai pengganti penandasahan SKD oleh pejabat yang berwenang. Untuk itu, WPLN wajib mencantumkan dalam form DGT-1 paling sedikit informasi mengenai nama WPLN, tanggal penerbitan, dan tahun pajak berlakunya *Certificate of Residence*.

Persyaratan Administratif SKD Lama

- menggunakan bahasa Inggris;
- diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
- berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
- sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
- mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud dalam persyaratan administratif SKD baru.

Persyaratan Administratif SKD Baru

- menggunakan bahasa Inggris;
- diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
- berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
- paling sedikit informasi mengenai nama WPLN, tanggal penerbitan, dan tahun pajak berlakunya Certificate of Residence; dan
- mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B.

Tax Refund

Ketentuan mengenai pengembalian kelebihan pembayaran/pemotongan atas pajak yang tidak seharusnya terutang (refund) juga mengalami penyesuaian dan relatif lebih lunak bagi WPLN. Apabila selama ini keterlambatan penyerahan SKD tidak dipertimbangkan dalam penetapan P3B, maka terhitung per 1 Agustus 2017 SKD yang telat dilaporkan tetap bisa digunakan dalam proses pengembalian kelebihan pemotongan pajak yang tidak seharusnya terutang.

Selain itu, WPLN juga bisa memanfaatkan P3B melalui mekanisme *Mutual Agreement Procedure* (MAP), dalam hal pemotong pajak tidak menggunakan P3B atau tidak menyampaikan SPT Masa. Sejalan dengan itu, maka format formulir DGT-1 dan DGT-2 mengalami penyesuaian.



Formulir DGT-1

NAME OF THE COUNTRY OF INCOME RECIPENT :		
Part I INCOME RECIPIENT	Part IV INDONESIA WITHHOLDING AGENT	
Tax ID Number :	Tax ID Number :	
Name :	Name :	
Full address :	Full address :	
Contact Number : email :	Contact Number :	email :
Part II DECLARATION BY THE INCOME RECIPIENT	Part V TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS AN INDIVIDUA	AL
	Name of Income Recipient : Date of birth (mm/dd/yyyy) : / /	
I, (full name) declare that I have examined the information provided in this form and to the best of my knowled correct, and complete. I further declare that I am this company	3. Full address	
taxpayer. (Please check the box accordingly)	One of the principal purpose of the arrangements or transactions is to obtain	Yes No
	benefit under the convention and contrary to the object and purpose of the DTC	☐ Yes ☐ No
	Are you acting as an agent or a nominee? Do you have permanent home in Indonesia?	Yes No
Signature of the income recipient or individual Place, date (mm/dd/yy)	7. In what country do your ordinarily reside?	
authorized to sign for the income recipient	8. Have you ever been resided in Indonesia?	Yes No
Part III CERTIFICATION BY COMPETENT AUTHORITY OR AUTHORIZED TAX OFFICE OF THE COUNTRY OF RESIDENCE	If so, in what period? / / to	
For the purpose of tax relief, it is hereby confirmed that the taxpayer mentioned in Part I is a res	Please provide the address :	
for the period to of the fiscal year	Do you have any office, or other place of business in Indonesia?	Yes No
the meaning of the Double Taxation Convention in accordance with Double Taxation Convention Indonesia and	If so, please provide the address :	
Official Stamp (if any)	Part VI TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS NON INDIVIDU	UAL
	Country of registration/incorporation Which country does the place of management or control reside?	
Name and Signature of the Competent Authority or Capacity/designatis authorized representative or authorized tax office	Address of Head Office :	
Office address :	4. Address of branches, offices, or other place of business in Indonesia (if any) :	
This form is available and may be downloaded at this website: <u>htt</u>		
DGT-1 Page 1	 One of the principal purpose of the arrangements or transactions is to obtain benefit under the convention and contrary to the object and purpose of the DTC 	Yes No
	There are relevant economic motives or other valid reasons for the establishment of the foreign entity	Yes No
	The entity has its own management to conduct the business and such management has an independent discretion.	Yes No
	8. The entity has sufficient assets to conduct business other than the assets	Yes No
	generating income from Indonesia. 9. The entity has sufficient and qualified personnel to conduct the business.	Yes No
	10. The entity has business activity other than receiving dividend, interest,	Yes No
	royalty sourced from Indonesia.	BE COMPLETED IF THE INCOME EARNED ARE DIVIDEND, INTEREST
	I declare that I have examined the information provided in this for Part VII true, correct, and complete.	ROYALTY
	1. The entity is act	ting as an agent, nominee or conduit
		controlling rights or disposal rights on the income
		r rights that generate the income. 0 per cent of the entity's income is used to satisfy claims by
	Signature of the income recipient or individual PIa other persons.	
	E The entity has a	the risk on its own asset, capital, or the liability Yes No contract/s which obliges the entity to transfer the income Yes No
		dent of third country.
	Part VIII INCO	OME EARNED FROM INDONESIA IN RESPECT TO WHICH RELIEF LAIMED
	1. Dividend, Inter	
	a. Type of incor	
		come liable to withholding tax under Indonesian Law : IDR
	Amount :	: Percentage :
	2. Income from re	endering services (including professional):
	a. Type of incor	
		come liable to withholding tax under Indonesian Law : IDR
	Amount :	: Percentage :
	d. Period of eng	gagement (mm/dd/yy) :
	 /	to/
	 ;	to
		// to//
	3. Other Type of I	
	a. Type of incor b. Amount of in	me :
	c. Amount of in	come liable to withholding tax under DTC :
	Amount :	: Percentage :
	I declare that I have true, correct, and c	e examined the information provided in this form and to the best of my knowledge and belief it is complete.
		. 1.1
		income recipient or individual Place, date (mm/dd/yy) Capacity in which acting gn for the income recipient
	ourself Et to any	
		This form is available and may be downloaded at this website: http://www.pajak.go.id

MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA DIRECTORATE GENERAL OF TAXES	(FORM DGT-2)	- 1: 5.0-	_
CERTIFICATE OF DOMICILE OF NON RESIDER FOR INDONESIA WITHHOLDING TAX	NΤ	Formulir DGT	-2
Guidance: This form is to be completed by a person (which includes a body of a person, corporate or non corp which has concluded Double Taxation Convention (DTC) with Indonesia, who is: a banking institution, or a person find, or			
 a person who claims relief from Indonesia Income Tax in respect of income arises from the trans- registered in Indonesia stock exchange and earned the income or settled the transaction the than interest and dividend. All particulars in the form are to be properly furnished, and the form shall be signed as complete. 	ough a Custodian in Indonesia, other ed. This form must be certified by the		
Competent Authority or his authorized representative or authorized tax office in the country where before submitted to Indonesian withholding agent/Custodian.			
NAME OF THE COUNTRY OF INCOME RECIPIENT :	(1)		
PARTI INCOME RECIPIENT			
Tax ID Number :	(2)		
Name :	(3)		
Contact Number : (5) email :	(4)		
	(V/		
purposes within the meaning of Double Taxation Convention of both countries 2. In relation with the earned income, I am this company is not acting as an the box accodingly)	are of residence) for Income tax agent or a nominee; (Please check company is not an Indonesian resident correct and complete;		
Signature of the income recipient or individual authorized to sign for the income recipient Place, date (mm/dd/yy)	Capacity in which acting		
PARTIII CERTIFICATION BY COMPETENT AUTHORITY OR AUTHORIZED TO	AX OFFICE		
For the purpose of tax relief, it is hereby confirmed that the taxpayer mentioned in Part I is a reside	nt in		
(11) for the period (12) to (13) of the fiscal year the meaning of the Double Taxation Convention in accordance with Double Taxation Convention con	(14) within		
Indonesia and (15)	INCOME EARNED E	ROM INDONESIA IN RESPECT TO WHICH RELIEF	
	PART IV IS CLAIMED	TOWN INDONESIA IN RESI EST TO WHIST REELE	
Official Stamp (if any)	1. Dividend, Interest, or Royalties:		
(16)	a. Type of income :		(20)
Name and Signature of the Competent Authority or his authorized representative or authorized tax office Capacity/designation	b. Amount of income liable to withhol	ding tax under Indonesian Law : IDR	(21)
Office address :	c. Amount of income liable to withhol Amount :		(23)
This form is available and may be downloaded at this website: http://	Amount :	(22) Percentage :((23)
DGT-2 Page 1	2. Income from rendering services (in		
	a. Type of income :		(24)
	b. Amount of income liable to withhol		(25)
	c. Amount of income liable to withhol	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(07)
	Amount : d. Period of engagement (mm/dd/yy)		(27)
	/ /	to / /	(20)
	1 1	to / /	
	1 1	to/	
		to//	
	3. Other Type of Income	Decis	
	a. Type of income :	Page	(29)
	b. Amount of income liable to withhol	ding tax under Indonesian Law: IDR	(30)
	c. Amount of income liable to withhol		
	Amount :	(31) Percentage : (31)	(32)
	true, correct, and complete.		i35)_
	authorized to sign for the income recip		

TAX BLITZ is a publication of MUC Consulting Group to provide our clients, contact, and business relations with information of tax news and latest tax regulation. The materials within are limited to the purpose of providing information and should not treated similarly as professional advice or basis in formulating strategic business decisions. For subscription of TAX BLITZ, please send your request by email to publishing@mucglobal.com. For more information about MUC Consulting Group, please click www.mucglobal.com

Kontak:

Informasi lebih jelas dapat menghubungi partners MUC Consulting Group berikut:



Wahyu Nuryanto
Tax Partner
wahyu.nuryanto@mucglobal.com





MUC Consulting Group, MUC Building, Jl. TB. Simatupang No.15, Tanjung Barat, Jakarta, Indonesia (1230)

Tel: +6221 78837111, Fax: +6221 7887666